1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Perkembangan Inflasi triwulan II

    Perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan rilis BPS, inflasi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar **3,80% (yoy)**, meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar **3,40% (yoy)**. Tingkat inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** serta kelompok **Transportasi**. Tekanan inflasi juga masih dipengaruhi oleh karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan yang menyebabkan biaya dan kelancaran distribusi barang sangat sensitif terhadap kondisi transportasi dan pasokan.

    Perkembangan inflasi pada akhir Triwulan II menunjukkan tekanan yang cukup kuat. BPS mencatat bahwa pada **Juni 2026**, Provinsi Maluku mengalami inflasi **1,49% (mtm)**, sehingga inflasi tahun kalender mencapai **2,85% (ytd)** dan inflasi tahunan mencapai **3,80% (yoy)**. Dari tiga wilayah yang menjadi cakupan pengukuran IHK, inflasi tahunan tertinggi terjadi di **Kota Tual sebesar 4,03%**, sedangkan **Kota Ambon sebesar 3,78%**.

    Secara bulanan, tekanan inflasi pada Triwulan II terlihat dari pergerakan April -0,17%, Mei 0,93%, dan Juni 1,49%. Dengan demikian, peningkatan inflasi pada akhir triwulan terutama tercermin pada akselerasi harga pada Juni. Setelah memasuki Triwulan III, inflasi bulanan kembali mengalami penurunan pada Juli sebesar -0,75%, sebelum kembali meningkat pada Agustus sebesar 0,81%.

    2. Perkembangan Harga Barang & Jasa

    Komponen harga yang perlu menjadi perhatian utama di Maluku adalah pangan dan transportasi. Dominasi volatile food menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas pangan dapat memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah. Kondisi ini menjadi semakin penting bagi Maluku karena karakteristik geografis kepulauan menyebabkan sebagian kebutuhan masyarakat harus didistribusikan antarpulau. Gangguan pada transportasi laut maupun udara, kenaikan biaya angkutan, cuaca, dan keterbatasan pasokan lokal dapat dengan cepat diteruskan menjadi kenaikan harga di tingkat konsumen. Bank Indonesia secara khusus menempatkan sensitivitas distribusi wilayah kepulauan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi inflasi Maluku.

    Pada kelompok transportasi, tekanan harga menjadi salah satu sumber utama inflasi. Data BPS Juni 2026 menunjukkan bahwa kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 9,87%, menjadi kelompok dengan inflasi tertinggi di Provinsi Maluku. Selain transportasi, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 6,49%, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 4,38%.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Maluku tidak cukup hanya difokuskan pada komoditas pangan, tetapi juga perlu memperhatikan biaya logistik, transportasi antarpulau, dan jasa. Kenaikan biaya distribusi berpotensi meningkatkan harga barang kebutuhan pokok secara tidak langsung karena biaya angkut menjadi bagian dari

harga akhir yang dibayar masyarakat.

2. Risiko dan Tantangan ke Depan

Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan TPID. Pertama, **risiko gangguan pasokan pangan** tetap menjadi perhatian karena sebagian kebutuhan pangan Maluku bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi cuaca yang kurang mendukung dapat mengganggu produksi dan distribusi komoditas pertanian maupun perikanan.

Kedua, terdapat **risiko kenaikan biaya transportasi dan logistik**. Karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan menyebabkan konektivitas antardaerah menjadi faktor penting dalam pembentukan harga. Gangguan transportasi, kenaikan harga bahan bakar, maupun kenaikan biaya angkutan dapat meningkatkan harga barang di daerah konsumen.

Ketiga, **risiko volatilitas harga pangan (volatile food)** masih perlu mendapat perhatian. Pengalaman Triwulan II menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan salah satu sumber utama tekanan inflasi. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi, pemantauan stok, serta intervensi pada komoditas yang mengalami kenaikan harga menjadi penting.

Keempat, terdapat **risiko eksternal**, terutama perubahan harga energi dan kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi, serta harga sejumlah barang. Pada tingkat nasional, Bank Indonesia juga mencatat bahwa tekanan volatile food dan administered prices menjadi faktor penting dalam dinamika inflasi 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dengan demikian, permasalahan utama pengendalian inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 terletak pada tingginya sensitivitas harga terhadap biaya transportasi dan distribusi antarpulau, volatilitas pasokan pangan, perbedaan tekanan harga antarwilayah, serta meningkatnya biaya produksi pada sisi produsen. Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks karena kondisi geografis Maluku yang berciri kepulauan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya membutuhkan intervensi harga pada saat terjadi kenaikan, tetapi juga penguatan produksi pangan lokal, pengamanan stok, konektivitas dan efisiensi distribusi, serta sistem pemantauan harga dan pasokan yang mampu memberikan respons lebih cepat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II 2026, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi dengan berpedoman pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kebijakan tersebut diarahkan terutama untuk merespons tekanan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Transportasi, yang menjadi sumber utama

inflasi Maluku. Pada Juni 2026, inflasi Maluku tercatat 3,80% (yoy).

1. Menjaga keterjangkauan harga

Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga komoditas pangan strategis dan intervensi harga ketika terjadi kenaikan yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat. Koordinasi TPID diarahkan untuk memastikan harga komoditas pangan tetap terjangkau, terutama pada periode meningkatnya permintaan masyarakat. Strategi ini menjadi penting karena inflasi Maluku pada Juni 2026 meningkat menjadi 3,80% (yoy), dengan tekanan yang cukup besar berasal dari pangan dan transportasi.

2. Pengamanan ketersediaan pasokan pangan

Kebijakan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengamanan pasokan antarwaktu maupun antarwilayah. Pemerintah dan TPID mendorong pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi lokal serta penguatan kerja sama pasokan dengan daerah lain. Pendekatan ini penting bagi Maluku karena karakteristik kepulauan menyebabkan ketersediaan komoditas di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kelancaran pasokan dari wilayah lain. Bank Indonesia mencatat bahwa sensitivitas distribusi wilayah kepulauan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi inflasi Maluku.

3. Penguatan kelancaran distribusi dan logistik

Kelancaran distribusi menjadi salah satu fokus utama karena biaya transportasi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga barang di Maluku. Kebijakan diarahkan pada penguatan koordinasi distribusi pangan, terutama dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Hal ini relevan dengan kondisi Juni 2026 ketika kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 9,87%, tertinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

4. Pelaksanaan GPIPS

Pengendalian inflasi di Maluku juga diperkuat melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai bagian dari sinergi TPID dengan Bank Indonesia. Program tersebut merupakan instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kesinambungan pasokan, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bank Indonesia menyebut implementasi GPIPS sebagai salah satu faktor pendukung optimisme bahwa inflasi Maluku tahun 2026 tetap berada dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%.

5. Penguatan koordinasi TPID dan pemantauan harga

TPID Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis. Pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menentukan respons kebijakan secara lebih cepat. Strategi tersebut mengikuti kebijakan nasional yang menekankan pentingnya ketersediaan pangan antarwilayah, distribusi pangan, kebijakan administered prices, serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 secara umum telah berjalan dan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat karena tekanan harga meningkat pada akhir triwulan. Inflasi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat 3,80% (yoy), meningkat dari 3,40% (yoy) pada Triwulan I 2026. Pada Juni 2026, inflasi bulanan mencapai 1,49% (mtm) dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,85% (ytd).

Permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya adalah kerentanan pasokan pangan, tingginya biaya transportasi dan distribusi antarpulau, serta disparitas tekanan harga antarwilayah. Karena itu, kebijakan ke depan perlu bergeser dari sekadar respons terhadap kenaikan harga menuju pengendalian yang lebih preventif, melalui penguatan produksi pangan lokal, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pengamanan stok, subsidi atau fasilitasi ongkos distribusi pada kondisi tertentu, pemantauan harga secara lebih intensif, serta penguatan intervensi sebelum terjadi kelangkaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Provinsi Maluku ke depan perlu difokuskan pada penguatan strategi 4K melalui pengamanan pasokan pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah, peningkatan produksi pangan lokal, serta penguatan kelancaran distribusi antarpulau. Tingginya tekanan kelompok transportasi dan karakteristik geografis Maluku menunjukkan pentingnya intervensi terhadap biaya logistik sebagai bagian integral dari pengendalian inflasi. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan harga dan pasokan yang lebih responsif sebagai *early warning system*, disertai penguatan cadangan pangan dan antisipasi gangguan cuaca. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui TPID dengan pendekatan yang spesifik berdasarkan karakteristik komoditas dan wilayah.